

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, A. (2012). *Penelitian kependidikan prosedur dan strategi*. Angkasa.
- Ahmadi Miru, & Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar ilmu hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Aulia, M. (2018). *Hukum perlindungan konsumen*. Pustaka Baru Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. (2008). *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Pradnya Paramita.
- David M. L. Tobing. (2019). *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.
- Esti Royani, et al. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*. Amerta Media.
- Gunawan Widjaja, & Ahmad Yani. (2003). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.
- H.M. Nasution. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Diadit Media.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

- Happy Susanto. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visi Media.
- Hasan, S. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visi Media.
- Kansil, C. S. T. (2008). *Hukum perusahaan Indonesia (Aspek hukum dalam ekonomi)*. Pradnya Paramita.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). *Principles of marketing (12th ed.)*. Pearson Education.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management (15th ed.)*. Pearson Education.
- Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Miru, A. (2004). *Hukum perlindungan konsumen*. Raja Grafindo Persada.
- Muchsin, F. P. (2015). *Hukum dan kebijakan publik: Analisis atas praktik hukum dan kebijakan publik dalam pembangunan sektor perekonomian di Indonesia (Cet. 2)*. Averroes Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muthia Aulia. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pustaka Baru Press.
- Nasution, A. (2001). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Diadit Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.

- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Royani, E., et al. (2020). *Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce*. Amerta Media.
- Sihombing, A., et al. (2023). *Hukum perlindungan konsumen*. Azka Pustaka.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Tobing, D. M. L. (2019). *Klausula baku: Paradoks dalam penegakan hukum perlindungan konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2003). *Hukum tentang perlindungan konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.
- Yanuar, I. (2021). *Metode penelitian sosial kualitatif*. Refika Editama.
- Yessy Kusumadewi, & Grace Sharon. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Yuswohady. (2015). *Marketing to the middle-class Muslim*. Gramedia Pustaka Utama.
- Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Aisyah, A., Naimah, B., Sitompul, R. R., & Purba, S. (2021). Tinjauan yuridis dalam perlindungan konsumen terhadap produk halal oleh pelaku usaha. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 182–189.

- A. Shidari. (2016). Pemetaan kelembagaan perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24, 24.
- Aziz, M. (2019). Regulasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia perspektif statute approach. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 151–170.
- Azhari, F. (2019). Transformasi kelembagaan sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 123–138.
- Becher, S. I. (2008). Asymmetric information in consumer contracts: The challenge that is yet to be met. *American Business Law Journal*, 45(4).
- Beby Suryani Fitri, Riswan Munthe, & Anggreni Atmei Lubis. (2021). Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1).
<https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4918>
- Chasanah, C. L., & Muzammil, S. (2024). Sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam perspektif yuridis. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 211–225.
<https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2022>
- Febriani, R. F., & Yulianingsih, W. (2019). Implementasi asas keseimbangan dalam transaksi jual beli di Giyomi ID Online Shop. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 379–384.
- Fathoni, M. A., Sukmana, R., & Hidayat, S. E. (2024). Unlocking barriers and strategies of halal certification for micro and small enterprises in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 22(1), 1–14.
- Fuad, M. (2023). Fungsi pengawasan BPJPH terhadap sertifikat halal pada UMKM. *Jurnal Hukum Lingkungan*.

- Fidelis Parmonang Sihotang, & Abdul Salam. (2025). Perbandingan hukum kerugian immateriil di Indonesia dan non-pecuniary loss di Amerika Serikat dalam kasus wanprestasi. *Lex Patrimonium*, 4(3), Article 1. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/1>
- Haryanti, P., & Khusnudin. (2024). The development of halal literacy in Indonesia from tradition to modernity. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 10(2), 235–250.
- Hasan, K. N. S. (2015). Pengawasan dan penegakan hukum terhadap sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 22(2), 290–307.
- Hasanah, H. (2004). Perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dengan fidusia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, 3(1).
- Hidl, A., et al. (2025). Rekonstruksi tiga pilar kewenangan sertifikasi halal di Indonesia: Telaah hukum pembagian tugas BPJPH, MUI, dan LPH dalam PP Nomor 42 Tahun 2024. *Journal of Economics and Community Yield*, 4(1). <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/4674>
- Hosen, M. N. (2022). Analisis undang-undang tentang jaminan produk halal. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.
- Ibrahim Nainggolan. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh affiliator. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 89–99.
- Irene Svinarky, & Parningotan Malau. (2020). Penerbitan sertifikat halal berdasarkan prespektif hukum di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1), 71–85. [https://doi.org/10.33884/jck.v8i1.1896\[orinews\]](https://doi.org/10.33884/jck.v8i1.1896[orinews])

- Ismaidar, et al. (2025). Restitusi dalam hukum perdata Indonesia: Konsep, dasar hukum dan implementasinya dalam penyelesaian sengketa. *Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum*, 9(12), 5.
- Jaang, S. (2023). Analisis perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan prinsip keadilan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(5), 349–357.
- Jawie Isti Atun Niza. (2023). Penerapan sistem jaminan produk halal sebagai bentuk kepastian hukum perlindungan konsumen. *JSII*, 1(1), 141–156.
- Kartika, A. F. (2020). Fenomena label halal is it a awareness or branding. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 87.
- Kurniawan, Kurniawan. (2026). Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia (kajian yuridis terhadap permasalahan dan kendala-kendala BPSK). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41(5), Article 1.
- Lakoro, F. S., Sukrianto, & Latif, S. (2024). Implementasi manajemen usaha terhadap pendapatan usaha mikro. *Jurnal CAPITAL: Kebijakan Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 6(2), 123–135.
- Lia Nur Cholifah. (2019). Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum jaminan produk halal: Analisis kewajiban dan tanggung jawab negara. *ASY-SYIR'AH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 53(2).
- Muh. Nadrattuzaman Hosen, Andar Zulkarnain Hutagalung, & Muhammad Amin Suma. (2022). Analisis undang-undang tentang jaminan produk halal dan undang-undang tentang cipta kerja (antara kenyataan dan keberlanjutan). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1).
- Muhajidin, M. (2020). The potential of halal industry in Indonesia to support economic growth. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 2(1), 77–90. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v2i1.1433>.

- Mujahidin, M. (2020). The potential of halal industry in Indonesia to support economic growth. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 2(1), 77–90.
- N. M. Paseru, M. R. Bima, & Nurhaedah. (2025). Perlindungan konsumen terhadap jaminan produk halal usaha mikro kecil dan menengah (studi di Kota Makassar). *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–12.
- Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiati, & Rina Yulianti. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (studi penyelenggaraan jaminan produk halal di Provinsi Banten). *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 40.
- Nasution, A. H., Abdullah, B., Nasir, M., & Qawi, I. (2025). Penegakan hukum atas label halal palsu: Studi kasus peredaran produk makanan anak di Kota Binjai. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 7(1), 729–738. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1.6909>
- Maswandi. (2024). Halal food in the perspective of consumer law protection. *International Asia of Law and Money Laundering*, 3(1). <https://doi.org/10.59712/iaml.v3i1.78>
- Nayyiroh, N. A., & Kamal, U. Perlindungan konsumen terhadap pencantuman label halal palsu pada produk jajanan anak.
- Nurul Fibrianti. (2020). Penyelenggaraan perlindungan konsumen: Sinergitas negara, pelaku usaha, dan konsumen. *Borobudur Law Review*, 2(2), 91.
- Paseru, N. M., Bima, M. R., & Nurhaedah. (2025). Perlindungan konsumen terhadap jaminan produk halal usaha mikro kecil dan menengah. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–12.
- Prasetyo, A. (2022). Analisis yuridis tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi online. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 14(1), 33–48.

- Qoniah, R. (2022). Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia di pasar global. *Halal Research Journal*, 2(1), 52–63.
- Rabiah Z Harahap. (2018). Pengawasan dan koordinasi sertifikasi halal. *De Legata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 108–118. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145>
- Qomaro, G. W., & Mawaddah, I. (2019). Product liability dan perlindungan konsumen terhadap produk berlabel halal palsu. *Jurnal Pamator*, 12(2), 78–83.
- Rachmadina, S., Zahrah, H., Daniswara, F., & Mahmudah, U. (2025). Dampak label halal palsu terhadap kepercayaan konsumen. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(1), 36–50.
- Ralang Hartati. (2019). Peran negara dalam pelaksanaan Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. *Judicial (Edisi Khusus)*, 61–76.
- Rambe, U., Jaswir, I., Wira, A., & Novia, A. (2025). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam sertifikasi halal. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan*, 6(3). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jkeat>
- Reslawati, R., Anwar, S., & Mahmud, M. (2025). Barriers to halal certification among micro, small, and medium enterprises in Makassar. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 25(1), 1–15.
- Rizkita Dinar Anggraini, & Sinarianda Kurnia Hartantien. (2024). Perlindungan konsumen atas hak informasi dalam melakukan transaksi online. *JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 13(1), 105.
- Rila Kusumaningsih. (2023). Fungsi pengawasan BPJPH terhadap sertifikat halal bagi produk makanan olahan berbasis UMKM. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8(2), 9–18.

- Safira, M. (2021). Perlindungan konsumen atas kelangkaan tempat tidur rumah sakit dampak Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen junto Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 230–243.
- Sahlevi Dwinanda. (2017). Perbandingan efektivitas penyelesaian sengketa konsumen pada pengadilan negeri dan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). *Reformasi Hukum*, 21(1), 110–138.
- Samhan Nafi' BS. (2024). Penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 10099–10115. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1983>
- Sakti, M. (2023). The urgency of global halal standards on products in supporting international trade. *Law Research Review Quarterly*, 553–582.
- Sitta Saraya, Yusrina Handayani, Dian Ratu Ayu, & Andri Winjaya Laksana. (2025). Perspektif hukum pidana terhadap produk belum bersertifikat halal dalam usaha perdagangan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(1), 2739–2754.
- Situmeang, Y. T., Sabila, M., Alsabilla, T. D., Lestari, D., & Putri, I. R. (2025). Analisis implementasi kebijakan wajib sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sektor pangan di Kota Pangkalpinang. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 159–172.
- Syahrudin Nawi. (2018). Hak dan kewajiban konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Pleno Jure*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v7i1.352>.
- Syahira Rachmadina, Halimah Zahrah, Fidelairna Daniswara, & Umu Mahmudah. (2025). Dampak label halal palsu terhadap kepercayaan konsumen dan

reputasi bisnis lokal. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(4), 4183–4191. <https://doi.org/10.62710/dst3zr21>.

Tambunan, J. C. C., & Suherman. (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen atas produk bersertifikat halal yang mengandung unsur tidak halal. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2332–2350.

Wahyu Simon Tampubolon. (2019). Peranan seorang arbiter dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1).

Widodo, A. C., Rudiana, & Nuryanto, Y. (2023). Pengawasan JPH oleh BPJPH di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1–15.

Yusuf Shofie. (2018). Jaminan atas produk halal dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(1), Article 3. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/3>

Skripsi/ Tesis

Dewi Mahthumah. (2017). *Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember].

Latiffa Rojikin Putri. (2024). *Tinjauan Hukum Terhadap Produk Makanan Minuman Yang Tidak Mencantumkan Label Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal* [Skripsi, Universitas Komputer Indonesia]

Muamala. (2025). *Pengaruh Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat Desa*

Galumpang Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah [Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu].

Sumber Online

BBC News Indonesia. (2025, Mei 26). Skandal kuliner non-halal di Solo – “Kita enggak tahu kalau pakai minyak babi, kita sangat kecewa.” *BBC News Indonesia*.

CNN Indonesia. (2025, Mei 25). Kremesan Ayam Goreng Widuran tidak halal, ini penjelasannya. *CNN Indonesia*.

Data Indonesia. (2022). Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam pada 2022. *Data Indonesia*.

Kementerian UMKM Republik Indonesia. (2025, Desember 21). Cara mengurus sertifikat halal lewat metode self declare. *Kementerian UMKM Republik Indonesia*. <https://umkm.go.id/news/tymrlkaelkr9o6waxlz1c5my>.

LPPOM MUI. (2025, April 22). Sejarah dan peran LPPOM MUI dalam merintis sertifikasi halal menuju wajib sertifikasi halal 2024. Halal MUI. <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/>

Tempo. (2019, Oktober 9). Menteri Agama: Sertifikasi halal berdampak positif bagi ekonomi. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-agama-sertifikasi-halal-berdampak-positif-bagi-ekonomi-697802>

Tempo. (2025, Mei 26). Siapa pemilik Ayam Goreng Widuran Solo yang viral karena label nonhalal. *Tempo*.

Timesprayer.com. (2026). Global Muslim population. *Timesprayer.com*. <https://timesprayer.com/en/muslim-population/>

Tribun Sumsel. (2025, Mei 26). Sosok Indra pemilik Ayam Goreng Widuran di Solo viral baru ngaku nonhalal, pengusaha Tionghoa. *Tribun Sumsel*.

World Population Review. (2024). Indonesia population 2024. <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia>

Undang-Undang

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Balai Pustaka.